

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi institusional regional atau kawasan jika ditelusuri kembali asalnya, mulai berkembang sejak berakhirnya Perang Dingin dimana kondisi dunia yang bipolar hilang. Dunia kemudian terbagi dalam beberapa divisi yang terpecah dan kemudian mendorong terbentuknya organisasi kawasan berdasarkan kesepakatan adanya kesatuan kawasan. Regional sendiri menurut (Väyrynen, 2003), lebih bermaksud pada adanya kedekatan dan spesifikasi kondisi geografis dimana negara-negara yang saling berdekatan satu sama lain dengan kultur yang hampir sama membentuk kawasan. Hal ini hampir serupa dengan definisi dari regionalisme yang diungkapkan oleh (Fawcett, 2004) dimana regionalisme merupakan usaha untuk menjalin kerjasama formal diantara negara-negara kawasan. Regionalisme dalam pandangan ekonomis juga merupakan suatu bentuk kebijakan yang diciptakan untuk mengurangi adanya batasan perdagangan pada negara-negara kawasan yang bersangkutan (Väyrynen, 2003). Hal ini juga terjadi di Asia Tenggara dimana regionalisme mulai terjalin ketika ASEAN mulai berdiri pada 1967 sebagai sebuah organisasi yang membawahi negara-negara kawasan Asia Tenggara dengan latar belakang kultur dan sejarah yang sama.

Regionalisme di Asia Tenggara tidak hanya berhenti sejak berdirinya ASEAN saja, melainkan keterlibatan lebih banyak negara kawasan untuk bergabung dari yang awalnya hanya negara inisiator saja menjadi sepuluh negara dan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada integrasi kawasan. Hal ini kemudian mendorong terbentuknya ASEAN Community 2015 yang berdasar pada tiga pilar utama yaitu politik dan keamanan,

ekonomi, dan sosial budaya, dengan tetap mengutamakan prinsip non-intervensi (Narine, 2012).

Integrasi ekonomi, sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menurunkan hambatan perdagangan dan berbagai macam hambatan lainnya diantara satu negara dengan negara lainnya. Dengan demikian, integrasi ekonomi akan mengembangkan pasar dan perdagangan, menyebabkan penurunan harga (karena tarif berkurang), meningkatkan daya saing antara mitra dagang melalui biaya-biaya yang lebih rendah dan dengan skala ekonomi yang lebih luas. Untuk beberapa pengaturan integrasi ekonomi, tujuan akhirnya adalah pasar tunggal dimana di dalam pasar tersebut terdapat arus barang yang bebas, jasa-jasa, modal, dan tenaga kerja, dan penyesuaian kebijakan ekonomi dan moneter antar negara/wilayah.

Tujuan yang paling mendasar dari integrasi ekonomi ini adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pembentukan integrasi ekonomi pada akhirnya akan menciptakan dampak meningkatnya kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan karena akan mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi, yang didasarkan pada keuntungan komparatif. (Battacharyay, 2000)

Berkaitan dengan integrasi ekonomi, pada tahun 1992 diciptakan area perdagangan bebas antara sesama negara ASEAN yang bernama Asean Free Trade Area (AFTA) sebagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan yang berlaku di negara-negara ASEAN yang diharapkan akan meningkatkan arus lalu lintas barang antar negara-negara ASEAN.

AFTA (Asean Free Trade Area) yang dibentuk untuk menciptakan satu pasar tunggal di kawasan ASEAN, berfungsi untuk menampung seluruh produksi negara-negara ASEAN, baik bentuk barang, jasa-jasa, tenaga kerja, dan Investasi dengan menghilangkan segala bentuk tarif sesuai dengan misi para pemimpin negara-negara ASEAN yang ingin membentuk ASEAN Economic Community (AEC) dimana waktu pembentukannya ditentukan pada tahun 2020.

Penerapan ASEAN Economic Community (AEC) atau Komunitas Ekonomi ASEAN yang dimulai pada 31 Desember 2015 akan menjadi babak baru bagi pengembangan perekonomian ASEAN. Penerapan ASEAN Economic Community ini sebenarnya dipercepat dari jadwal semula yakni pada tahun 2020 menjadi tahun 2015. AEC dimaksudkan untuk menjadi pasar tunggal dan basis produksi, dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal lebih bebas. AEC juga diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi yang merata di kawasan dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2015. (Secretariat, Economic Integration and Cooperation, 2004)

Permasalahan lain yang muncul dari dalam ASEAN sendiri adalah masih adanya ketimpangan pembangunan ekonomi yang sangat besar antar negara anggota di ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu pendapatan perkapita. Data menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan perkapita ASEAN-6 (Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei) 10 kali lebih besar daripada Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura sudah jauh meninggalkan negara-negara yang baru saja bergabung dengan ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV).

Adanya ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi antara anggota ASEAN tersebut muncul karena prestasi pembangunan negara-negara ASEAN berbeda satu sama lain. Ada kelompok negara yang sudah berorientasi ekspor dengan industrialisasinya seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina sedangkan negara lainnya masih mengandalkan sektor pertanian untuk menopang perekonomiannya.

Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun ASEAN telah memasuki babak baru dalam sejarah organisasi regional tersebut, yaitu pembentukan ASEAN Economic Community. Namun pada kenyataannya, walaupun realita di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini syarat-syarat yang ada masih belum bisa dipenuhi oleh negara-negara anggota ASEAN, para pemimpin ASEAN masih ingin melanjutkan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. (Indonesia K. P., Menuju ASEAN Economic Community 2015, 2013)

Isu mengenai ketimpangan pembangunan sudah menjadi perhatian para pemimpin ASEAN sejak lama. Program seperti Initiative for ASEAN Integration (IAI) yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2004 ini adalah contoh wujud perhatian ASEAN terhadap isu ketimpangan ini. IAI sebagai salah satu program untuk membantu CLMV untuk mengejar ketertinggalan juga belum memberikan dampak signifikan. Program-program IAI kemudian dicantumkan dalam AEC Blueprint pada tahun 2008. Pada kenyataannya, realita saat ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan masih sangat besar. Masalah kemiskinan, kurangnya tenaga kerja terampil, angka pengangguran tinggi, infrastruktur yang buruk, rendahnya daya saing dan kurangnya pendidikan masih menjadi masalah serius bagi negara-negara CLMV. AEC Blueprint juga menjadi batu loncatan untuk pembangunan ASEAN yang signifikan. Selama ini regional community building di ASEAN bersifat terbuka dan tidak

mengikat sehingga ASEAN sebagai organisasi tidak memiliki kapasitas untuk menekan baik di tingkat nasional satu negara ataupun di tingkat regional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah

- Bagaimana proses ASEAN melakukan integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community tahun 2015 ?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Unruk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah didalam penulis memakai sebuah teori atau konsep. Peneliti berusaha menjawab rumusan masalah dalam kerangka dasar pemikiran, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Integrasi Ekonomi dan Konsep Indentitas.

Teori Integrasi Ekonomi

Secara umum integrasi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah proses di mana sekelompok Negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya. Namun menurut Venables (2000) integrasi ekonomi regional terjadi saat beberapa Negara membentuk sebuah fakta perdagangan bebas yang tujuannya membuka akses perdagangan seluas mungkin satu sama lain. Venables juga menekankan makna integrasi regional ke sebuah pemahaman mendalam tentang perdagangan internasional lebih dari sekedar penghapusan tarif impor dan kuota untuk menghilangkan segmentasi pasar dengan menyerukan totalitas integrasi kedalam ranah yang lebih tinggi. (Suryanta, 2012)

Sedangkan Solvatore (1997) menguraikan integrasi ekonomi atas beberapa bentuk; Pertama, Pengaturan Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Arrangements) dibentuk oleh Negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan di antara mereka dan membedakannya dengan Negara-negara yang bukan anggota. Kedua, kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area) di mana semua hambatan perdagangan baik tariff maupun non tariff di antara Negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing Negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap Negara-negara non anggota. Ketiga, persekutuan Pabean (Custom Union) mewajibkan semua Negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap Negara lain non-anggota. Keempat, Pasaran Bersama (Common Market) yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan namun arus factor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Kelima, Uni ekonomi (Economic Union) yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. (Ridwan, 2009)

Integrasi regional yang dikembangkan oleh negara anggota ASEAN banyak dipengaruhi oleh pendekatan konstruktivisme. Adopsi proposisi dan asumsi konstruktivisme tidak lepas dari faktor sejarah dan konteks sosial yang tengah berlangsung dalam kawasan ASEAN. Berbagai pendekatan mencoba menjelaskan fenomena ASEAN dari awal pembentukan, masa krisis Asia, sampai globalisasi. Pemilihan teori ini dilandaskan pada pemahaman penulis bahwa keterlibatan dan kepatuhan negara dalam suatu integrasi regional jika tidak berdasarkan

pemanfaatan materil yang secara matematis dapat ditentukan, maka berdasarkan tatanan identitas yang berkembang di antara Negara anggota untuk bersepakat mencapai suatu tujuan bersama.

Konstruktivisme kemudian hadir untuk membawa angin segar bagi pola interaksi negara anggota ASEAN. Upaya pemulihan negara-negara anggota dari krisis yang membuktikan bahwa ASEAN masih sanggup bertahan dalam konstelasi internasional dijelaskan konstruktivisme melalui penguatan identitas bersama. Asumsi pentingnya ideologi dan identitas dalam konstruktivisme mampu menggeneralisasi kohesi regional dalam menghadapi ancaman, termasuk ancaman keamanan dan ekonomi yang dapat dicapai melalui integrasi regional.

Dengan menganalisa teori integrasi dalam penelitian integrasi ekonomi ASEAN menuju tahap ASEAN Economic Community tahun 2015. ASEAN sebagai kawasan regionalism telah memulai integrasi ekonomi dimana diberlakukannya ASEAN Economic Community tahun 2015. ASEAN Economic Community (AEC) pada dasarnya adalah perluasan dari integrasi ekonomi regional yang telah dimulai beberapa tahun silam, tepatnya pada saat pembentukan AFTA tahun 1992. Diberlakukannya ASEAN Economic Community yang lebih lebih awal dari rencana sebelumnya yaitu tahun 2020 sangat mengejutkan karena dilihat dari kesiapan Negara-negara anggota yang bisa dikatakan masih banyak tidak memenuhi syarat. Kemudian, tahap integrasi ekonomi menurut Solvatore (1997) yang melalui empat tahap untuk benar benar menjadi sebuah ASEAN Economic Community. Dimana tujuan ASEAN Economic Community ini akan membebaskan hambatan-hambatan perdagangan untuk Negara anggota. Hambatan yang dimaksud pun ialah bebasnya segala tariff perdagangan, jasa, dan modal.

Tahapan-tahapan ini berlangsung terpisah di mana sebelum melangkah ke tahapan lebih tinggi, perlu diselesaikan terlebih dahulu tahapan yang lebih rendah.

AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA). Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Namun, sebelum perjanjian AFTA disepakati, selang beberapa decade setelah dibentuknya ASEAN sebagai kawasan regionalism.

ASEAN membentuk instrumen ekonomi yang pertama melalui PTA yang ditandatangani pada tanggal 24 februari 1977 di Manila, Filipina. PTA ini merupakan kesepakatan di ASEAN untuk menurunkan tarif sejumlah produk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN. Seiring perkembangan waktu, ASEAN sepakat untuk lebih memperdalam kerja sama ekonomi dengan menyepakati CEPT-AFTA yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas ASEAN di bidang barang yang pertama kali. CEPT-AFTA dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui percepatan liberalisasi perdagangan dan investasi intra-ASEAN. (Community, 2015)

ASEAN berpandangan bahwa selain meliberalisasi Perdagangan di sektor Barang, juga dipandang perlu untuk meliberalisasi Perdagangan di sektor Jasa. Integrasi sektor Jasa ASEAN dimulai dengan penandatanganan AFAS oleh Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995. Perkembangan kerja sama ekonomi di ASEAN, ASEAN memandang perlu untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui kerja sama investasi. Oleh karenanya, para Menteri Ekonomi ASEAN menandatangani AIA pada tanggal 7 Oktober 1998 di Makati, Filipina yang bertujuan untuk menciptakan rezim investasi yang semakin

liberal dan transparan di kawasan. Kemudian pada tanggal 29 November 2004, para Pemimpin Negara ASEAN menyepakati 11 sektor utama yang akan diintegrasikan, melalui penandatanganan ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors yang mencakup: Produk Berbasis Agro, Otomotif, E-ASEAN, Elektronik, Perikanan, Kesehatan, Produk Berbasis Karet, Tekstil dan Pakaian Jadi, Kepariwisata dan Produk Berbasis Kayu. (Community, 2015)

Pada Pertemuan KTT ASEAN ke-12 tanggal 13 Januari 2007, para Pemimpin Negara ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan ASEAN Community, termasuk Pilar Ekonomi dari tahun 2020 ke tahun 2015. Pertemuan KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 20 November 2007, para Pemimpin Negara ASEAN menandatangani ASEAN Charter yang menjadi dasar hukum ASEAN dan semakin memperkuat eksistensi ASEAN di dunia. Untuk Pilar Ekonomi, para Pemimpin ASEAN juga menandatangani ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint yang menjadi acuan dalam mencapai ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Tahun 2008 merupakan tahun pertama berlakunya ASEAN Charter dan AEC Blueprint. Pemberlakuan AEC Blueprint dilakukan dalam 4 tahap yaitu Tahap I tahun 2008-2009, Tahap II tahun 2010-2011, Tahap III tahun 2012-2013, dan Tahap IV tahun 2014-2015. (Community, 2015)

Dalam rangka menyempurnakan Perdagangan Barang di ASEAN, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk menandatangani ATIGA pada tanggal 26 February 2008 di Thailand. Disamping itu, pada saat yang sama dan untuk semakin menjamin rezim investasi yang semakin terbuka dan transparan, para Menteri Ekonomi ASEAN juga menandatangani ACIA. Mewujudkan suatu Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (Pilar II ASEAN Economic Community), pada tanggal 17 November 2011 di Bali, Indonesia, para Pemimpin

Negara ASEAN sepakat untuk mengadopsi ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED). (Community, 2015)

Pada KTT ASEAN ke-19 di Bali tanggal 14-19 November 2011, para Pemimpin ASEAN menyetujui ASEAN Framework Agreement for Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang merupakan penguatan dari Persetujuan Perdagangan Bebas antara ASEAN dan Negara Mitranya, sejalan dengan Pilar ke-IV ASEAN Economic Community untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Pada tanggal 22 November 2015, para kepala negara ASEAN menandatangani dua Deklarasi penting yang merupakan tonggak bersejarah dalam perjalanan integrasi ASEAN. Bisa dilihat tahap-tahap perjanjian yang telah dilalui ASEAN adalah bentuk dari integrasi ekonomi ASEAN. (Community, 2015)

Dalam upaya menganalisa konstruksi sosial yang terjadi tidak hanya dibutuhkan basis material namun juga faktor intersubjektif, khususnya peranan norma, proses sosialisasi dan pembangunan identitas dalam membentuk komunitas. Norma-norma ASEAN turut berperan dalam regionalisme di Asia Tenggara dan pembentukan identitas regional.

D. Hipotesis

Dengan menggunakan teori integrasi proses perkembangan regionalism ASEAN, yang mengikuti tahap integrasi ekonomi. Maka penulis menarik hipotesa sementara, bahwa ASEAN melakukan integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community tahun 2015 melalui beberapa proses perjanjian perdagangan bebas. Model proses perjanjian tersebut di bagi menjadi empat bagian :

1. Tahap pertama, Preferential Trading Area (PTA) yang terbukti dari dalam perjanjian Preferential Trading Arrangements ASEAN.
2. Kedua, Perdagangan Bebas (Free Trade Area) yang terbukti dalam perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA).
3. Ketiga, Persekutuan Pabean (Custom Union) yang terbukti dalam perjanjian ASEAN Framework Agreement on Services, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA).
4. Keempat, Pasaran Bersama (Common Market) yang terbukti dalam perjanjian ASEAN Economic Community 2015.
5. Kelima, Uni Ekonomi (Economic Union) ASEAN Economic Community 2015.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan akademis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuat kajian mendalam mengenai proses integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC.
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi dunia pendidikan, dan tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan masyarakat, dan kalangan akademis, sehingga timbulnya pengertian tujuan dari integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC.

F. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membuat jangkauan dan batasan penelitian hanya pada proses integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Dimana, integrasi ekonomi ini dibentuk dengan tujuan perkembangan ekonomi antar kawasan di ASEAN merata. Bagaimana proses integrasi tersebut dilakukan agar tercapainya kesetaraan perkonomian kawasan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil dan membahas sumber-sumber lainnya selama masih berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas pada tulisan ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang muncul pada awal penelitian. Metode ini adalah metode penelitian ilmu sosial yang bersifat deskriptif dan berusaha untuk menginterpretasikan gejala yang terjadi pada sebuah konteks sosial. Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan memanfaatkan data-data sekunder yaitu yang diperoleh melalui library research diantaranya bersumber dari buku, e-book, jurnal, dokumen, media massa, artikel dari internet mengenai ASEAN Economic Community.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif yang melibatkan hubungan secara kausalitas. Teknik analisa data dilakukan melalui analisa non-statistik dimana data yang bersifat kuantitatif seperti angka, tabel, grafik yang tersedia diuraikan dan ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat atau paragraf. Teknik analisa data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap yaitu mengklasifikasikan data, mereduksi data, dan memberi interpretasi pada data yang telah diseleksi dengan menggunakan teori dan konsep.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuktikan hipotesa dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Pengelompokan ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan jenis permasalahannya yang diteliti, kemudian dikomparasikan sehingga menjadi satu kesatuan.

Bab I berisi pendahuluan penulisan yang dirangkai oleh latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, kerangka dasar pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II berisi perkembangan regionalism Asia Tenggara, Ketimpangan Pembangunan Negara Anggota, dan Konsep AEC Blueprint

Bab III berisi pembahasan tahapan integrasi ekonomi ASEAN menuju ASEAN Economic Community.

Bab IV berisi kesimpulan penelitian mengenai bagaimana integrasi ekonomi ASEAN dalam pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015.